

ABSTRAK

Analisis Standar Kebijakan Pengoperasian Pesawat udara Kecil Tanpa Awak Dengan Sistem Remote Pilot Sebagai Pertahanan Dan Keamanan Negara.

Oleh: Adam Ramadhan Rifai

Dosen Pembimbing Utama: Dr. Zainuri. SH., MH.

Dosen Pembimbing Pendamping: Anita. SH., MH.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang terjadi di zaman yang semakin maju salah satunya adalah maraknya pengoperasian Drone dengan berbagai jenis dan ukuran dalam berbagai aktivitas kehidupan. merupakan kendaraan udara tanpa awak atau pilot pengendali di dalamnya.

perumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum dalam pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak yang digunakan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara dan Bagaimana standar kebijakan perizinan pengoperasian pesawat udara kecil tanpa awak serta dengan tujuan untuk mengetahui dan menjadikan wawasan konsekuensi hukum jika terjadinya kelalaian dalam pengoperasian drone yang digunakan sebagai pertahanan dan keamanan negara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*Legal reseach*). Sedangkan, pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan ditelaah, antara lain Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 tahun 2016 Tentang Sistem Pesawat Terbang Tanpa Awak Untuk Pertahanan Dan Keamanan Negara. sedangkan pengumpulan data yang diperoleh dari bahan sekunder diperoleh dari Artikel, Jurnal hukum, Buku Skripsi Hukum dan internet

peraturan pengoperasian drone yang digunakan sebagai tugas pertahanan dan keamanan negara menjadi teknologi yang dapat digunakan sebagai peralatan pendukung untuk operasi militer. standar kebijakan perizinan pengoperasian drone yang mencakup aturan dan terdapat pedoman yang ditetapkan oleh otoritas penerbangan sipil untuk memastikan keamanan dan kepatuhan operasional.

Regulasi operasi drone di Indonesia berbagai undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian perhubungan dan pertahanan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa adanya aturan yang jelas pada batasan umur saat menggunakan drone serta penggunaan drone yang aman, legal, dan sesuai dengan hukum. Penulis menyarankan agar pengguna selalu meriset kejadian yang akan datang untuk menjadikan wawasan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi terkait drone sehingga pengguna harus lebih bertanggung jawab untuk mengoperasikan drone dengan berhati-hati.

Kata Kunci : Drone, Regulasi, Pertahanan & keamanan negara

ABSTRACT

Analysis of Standard Policies for the Operation of Small Unmanned Aircraft with Remote Pilot Systems for National Defense and Security.

By: Adam Ramadhan Rifai

Main Supervisor: Dr. Zainuri. SH., MH.

Assistant Supervisor: Anita. SH., MH.

One of the advances in science and technology that occurs in increasingly advanced times is the widespread operation of drones of various types and sizes in various life activities. is an unmanned aerial vehicle or a controlling pilot in it.

The formulation of the problem in this thesis research is what the legal regulations are for the operation of small unmanned aircraft which are used as a means of national defense and security and what are the standard licensing policies for the operation of small unmanned aircraft and with the aim of knowing and providing insight into the legal consequences if negligence occurs in operation of drones used for national defense and security.

The type of research used in this research is normative juridical research (Legal research). Meanwhile, data collection uses primary and secondary data, namely data obtained from legal science materials that are closely related to the problems to be studied, including Minister of Defense Regulation Number 26 of 2016 concerning Unmanned Aircraft Systems for National Defense and Security. while data collection obtained from secondary materials was obtained from articles, legal journals, legal thesis books and the internet

regulations for operating drones which are used for national defense and security tasks have become technology that can be used as supporting equipment for military operations. a standard drone operation licensing policy that includes rules and guidelines established by civil aviation authorities to ensure operational safety and compliance.

Regulations for drone operations in Indonesia include various laws and regulations set by the Ministry of Transportation and Defense. This regulation aims to ensure that there are clear rules regarding age limits when using drones as well as safe, legal and lawful use of drones. The author suggests that users always research upcoming events to provide insight for users to obtain information related to drones so that users must be more responsible for operating drones carefully.

Keywords : Drones, Regulations, Defense & national security